



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POSYANDU BALITA TERHADAP EFEKTIVITAS SKRINING TUMBUH KEMBANG BALITA DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Dina Fitriani

Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Email : dinaf008@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita Terhadap Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Pengambilan judul tersebut dilatar belakangi karena penulis melihat adanya fenomena masalah yang timbul yaitu belum tercapainya Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan baik. Rendahnya Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita tersebut diduga karena belum sepenuhnya melaksanakan Implementasi Kebijakan Posyandu dengan baik. Dalam kerangka pemikiran dikemukakan beberapa teori menurut para ahli yang ada kaitannya dengan implementasi kebijakan dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan dimana dalam studi lapangan penulis mempergunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan angket. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita Terhadap Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya”, maka ditarik kesimpulan bahwa besaran Pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita Terhadap Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita sebesar 57,2%. Sedangkan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, misalnya kepemimpinan, koordinasi ataupun dan lain sebagainya yang sangat ditentukan dari perspektif yang digunakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Skrining

ABSTRACT

This thesis is entitled The Influence of the Implementation of the Toddler Posyandu Policy on the Effectiveness of Toddler Growth and Development Screening in Bantarkalong Village, Cipatujah District, Tasikmalaya Regency. The background to this title was chosen because the author saw that there was a problem phenomenon that had arisen, namely that the effectiveness of Toddler Growth and Development Screening had not been



achieved properly in Bantarkalong Village, Cipatujah District, Tasikmalaya Regency. The low effectiveness of Toddler Growth and Development Screening is thought to be due to not yet fully implementing the Posyandu Policy properly. Within the framework of thought, several theories according to experts are put forward that are related to policy implementation and effectiveness. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach, namely library study and field study data collection techniques where in the field study the author used research instruments of observation, interviews and questionnaires. Based on the results of research and discussion regarding: "The Influence of the Implementation of the Toddler Posyandu Policy on the Effectiveness of Toddler Growth and Development Screening in Bantarkalong Village, Cipatujah District, Tasikmalaya Regency", it was concluded that the magnitude of the influence of the Toddler Posyandu Policy Implementation on the Effectiveness of Toddler Growth and Development Screening was 57.2%. Meanwhile, the remaining 42.8% is influenced by other factors that are not researched, for example leadership, coordination or so on which are largely determined by the perspective used.

Keywords: Policy Implementation on Screening Effectiveness

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan permendagri inilah dibentuk kelompok kerja yang disebut dengan Pokjnal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dan Pokja Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan. Terdapat lima fungsi Pokjnal Posyandu dan Pokja Posyandu, yaitu Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu; Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu; Pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu; Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat.

Untuk menunjang pembangunan di Negara Indonesia, makin dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi sehingga perlu ditingkatkan sejak usia dini melalui layanan sosial dasar masyarakat. Untuk itu pelayanan sosial dasar masyarakat perlu diintegrasikan dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Untuk itu pada tahun 2011 diterbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.

Pada tataran implementasi kebijakan di tingkat desa, sesungguhnya di Desa Bantarkalong sudah terdapat langkah dan kegiatan yang nyata dari Pemerintah Desa Bantarkalong dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 011 Tahun 2020, Bulan Januari 2020 Tentang Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, beserta terpilihnya 6 (enam) orang pengurus Posyandu Balita Desa

Bantarkalong serta terdapatnya sebanyak 50 (lima puluh) kader Posyandu se-Desa Bantarkalong yang tersebar di 13 Posyandu Tingkat Rukun warga (RW) dalam menangani skrining tumbuh kembang balita Desa Bantarkalong.

Dari segi sarana, baru Posyandu Balita skrining tumbuh kembang balita Desa Bantarkalong yang sudah memiliki bangunan tersendiri. Sedangkan untuk Posyandu yang lainnya masih menggunakan rumah warga. Kemudian untuk kegiatan rutin posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh kader posyandu dengan bimbingan teknis dari petugas kesehatan atau bidan desa selama 1 bulan sekali. Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan oleh posyandu dengan sistem layanan 5 meja atau 5 langkah kegiatan, yaitu: (1) Pendaftaran; (2) Penimbangan; (3) Pencatatan/pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS); (4) Penyuluhan; dan (5) Pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya

Hasil pra penelitian/penjajagan awal yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan efektivitas skrining tumbuh kembang balita Desa Bantarkalong, Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan adanya fenomena-fenomena permasalahan dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Posyandu di tingkat RW, di Desa Bantarkalong pada umumnya diduga belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dan berkesinambungan ada beberapa kader di Posyandu Kepiting 2, Posyandu Peny 1 dan Posyandu Jamal Roti 2, dimana sumber daya kadernya tidak aktif bahkan ada yang keluar dengan alasan bekerja ke luar desa.
2. Pelayanan yang diberikan di Posyandu Tingkat RW di Desa Bantarkalong diduga kurang berjalan secara efektif dikarenakan sarana dan prasarannya tidak mendukung hanya mengandalkan bantuan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Posyandu Tingkat Desa.

Berdasarkan uraian berbagai fenomena permasalahan efektivitas skrining tumbuh kembang balita Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan kurang menjalankan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, seperti :

1. Adanya dugaan masih kurang koordinasi diantara Pengurus Posyandu Tingkat Desa dan RW dengan Pengurus Posyandu Balita Desa Bantarkalong, khususnya Unit Pelayanan Kesehatan dan KB sekaligus Bidan Desa, dikarenakan bidan desa tersebut kurang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 13 Posyandu Tingkat RW.
2. Revitalisasi posyandu masih belum dikatakan berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak pos-pos Posyandu yang masih kekurangan dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatannya. Ditambah pula pengetahuan dan keterampilan para kader tentang kesehatan tidak merata serta pendanaan terhadap kegiatan Posyandu yang masih belum jelas sumber dananya.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh Implementasi kebijakan posyandu balita terhadap efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

Tinjauan Pustaka

Model proses atau alur Smith (Tachjan, 2006, hal. 39), mengajukan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan istilah “*A Model of The Policy Implementation Process*”. Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat model yang perlu diperhatikan. Keempat model dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan yang ideal (*idealied policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan;
2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;
3. *Implementating organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan;
4. *Enviromental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Steers, 2005, hal. 53), yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Metode (Desain) Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dimaksudkan untuk mempelajari suatu permasalahan dengan penelitian ilmiah juga melihat kemungkinan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Bentuk hubungaitu ialah hubungan kausalitas dan fungsional. (Indrawan & Yaniawati, 2017, hal. 51)

Populasi adalah jumlah pegawai secara keseluruhan yang terdiri atas objek dan subjek di tempat penelitian. Menurut (Sugiyono, 2016, hal. 62), adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Posyandu Balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, memiliki 7 buah Posyandu, dengan strata 5 madya dan 2 purnama. Ketujuh Posyandu berjumlah 40 orang kader.

Jadi populasi yang terdapat di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya tersebut sebanyak 40 orang dan penulis menetapkan responden sebanyak 40 orang responden yang di sebarakan dengan angket dan 1 responden yaitu Kepala Desa Bantarkalong dilakukan dengan cara wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya penulis akan menguji hipotesis penelitian mengenai : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita Terhadap Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita Di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya”, dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 40 responden, penulis akan mengolah dan menganalisa data-data tersebut dengan berpedoman dari jawaban yang diberikan responden melalui angket.

Keseluruhan angket yang disebarakan baik variabel bebas dan variabel terikat berisi 8 pertanyaan mengenai (X) “Implementasi kebijakan” dan 5 pertanyaan mengenai (Y) “Efektivitas ”. Sebagai alat untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan dengan efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Dimana terhadap hasil jawaban angket tersebut telah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan hasilnya dapat dinyatakan valid dan reliabel pada tabel 4.16

Tabel 4.16

Tabel Rekapitulasi Uji Validitas

Tabel Hasil Implementasi kebijakan Dan Efektivitas

No.	r_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	0,852	0,284	Valid
2	0,885	0,284	Valid
3	0,885	0,284	Valid
4	0,874	0,284	Valid
5	0,815	0,284	Valid
6	0,899	0,284	Valid
7	0,302	0,284	Valid
8	0,331	0,284	Valid
9	0,291	0,284	Valid
10	0,299	0,284	Valid
11	0,843	0,284	Valid
12	0,876	0,284	Valid
13	0,795	0,284	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang terdapat pada variabel penelitian, dinyatakan valid di buktikan dengan koefisien korelasi yang lebih besar dari 0.284. menurut Sugiyono (2016), nilai korelasi selanjutnya dibandingkan dengan R_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan $df = n - 2 = 48$, maka peroleh 0.284.

Tabel 4.17

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N Of Items</i>	Keterangan
Implementasi kebijakan	0.572	8	Reliabel
Efektivitas	0.529	5	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 setiap variabel dalam penelitian, dinyatakan reliabel dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,6. Maka seluruh instrument dalam variabel penelitian dapat dikatakan reliabel, dan layak digunakan dalam penelitian.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita terhadap efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, maka dilakukan analisis dengan teknik analisis regresi sederhana, dengan hipotesis : ***“Implementasi Kebijakan Posyandu Balita Berpengaruh Terhadap Efektivitas skrining tumbuh kembang balita”***.

Pengolahan data menggunakan bantuan software SPSS V.25 dan diperoleh persamaan:

$$Y = 2,125 + 0.529 X$$

Berdasarkan persamaan regersi sederhana di atas, diketahui bahwa nilai konstanta maupun koefisien variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut memiliki hubungan yang searah. Yang berarti efektivitas skrining tumbuh kembang balita akan meningkat seiring meningkatnya implementasi kebijakan. Sedangkan nilai konstanta sebesar 2,125 menunjukkan tingkat efektivitas skrining tumbuh kembang balita akan sebesar 2,125 pada saat tingkat implementasi kebijakan 0 (nol).

Nilai koefisien regresi sebesar 0.529 yang menunjukkan besarnya perubahan efektivitas skrining tumbuh kembang balita sebagai akibat adanya perubahan implementasi kebijakan setiap satu satuan.

Untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti dapat dilihat dari nilai r. Berdasarkan perhitungan SPSS versi 25, diperoleh nilai r sebesar 0,757. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara implementasi

kebijakan dengan efektivitas skrining tumbuh kembang balita termasuk kategori kuat/tinggi. Nilai r yang positif menunjukkan bahwa hubungan pengaruh implementasi kebijakan dengan efektivitas skrining tumbuh kembang balita searah. Jika implementasi kebijakan semakin baik, maka efektivitas skrining tumbuh kembang balita akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Sedangkan untuk melihat besar pengaruh dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas skrining tumbuh kembang balita dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi. Berdasarkan pengolahan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,572 atau 57,2%.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, bahwa implementasi kebijakan sudah dilaksanakan dengan ukuran indikator implementasi kebijakan secara keseluruhan akan tetapi belum optimal sehingga berpengaruh terhadap efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang masih belum dilaksanakan secara optimal.

Atas dasar perhitungan diatas, bahwa Implementasi Kebijakan Posyandu Balita mampu untuk mendorong adanya efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, jika sebaliknya implementasi kebijakan mengarahkan dengan cara yang kurang baik maka akan terjadi penurunan terhadap efektivitas skrining tumbuh kembang balita, dengan demikian, hipotesis yang penulis ajukan terbukti kebenarannya dan dapat diterima.

Dari penjelasan di atas, mengacu pada hierarki pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita berdasarkan ukuran indikator implementasi kebijakan sangatlah penting untuk menunjang pelaksanaan efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mempengaruhi tercapainya efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya diakibatkan belum sepenuhnya dilaksanakan indikator implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan belum tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Posyandu Balita Terhadap Efektivitas Skrining Tumbuh Kembang Balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya”, maka ditarik kesimpulan bahwa besaran pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas skrining tumbuh kembang balita sebesar 57,2%. Sedangkan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, misalnya kepemimpinan, koordinasi ataupun dan lain sebagainya yang sangat ditentukan dari perspektif yang digunakan. Meningkat tidaknya efektivitas skrining tumbuh kembang balita dapat ditentukan oleh :

- 1) Implementasi kebijakan melalui Kebijakan yang ideal (*idealied policy*)
- 2) Implementasi kebijakan melalui Kelompok sasaran (*target groups*)
- 3) Implementasi kebijakan melalui *Implementating organization*
- 4) Implementasi kebijakan melalui *Enviromental factor*

Adapun untuk efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, hal ini terlihat dari :

- a) Masih adanya beberapa kader posyandu yang datang terlambat dan keluar kantor untuk urusan pribadi tanpa ijin padahal waktu tersebut terbilang waktu efektif kerja
- b) Masih adanya pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Kepala Desa Bantarkalong Pasal 6 tentang pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita di lingkungan Desa Bantarkalong

Belum meningkatnya efektivitas skrining tumbuh kembang balita dan perangkatnya di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya antara lain disebabkan oleh penerapan implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini berarti bahwa penerapan implementasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas skrining tumbuh kembang balita di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya belum tercapai dengan paik perlu peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, 2016, *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Mas Agung.
- Dwiyanto, 2008, *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : IIP Press.
- Islamy, 2016, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kusnandar, 2010, *Kebijakan Publik dari Formulasi, Implentasi ke Evaluasi*. Bandung: Multazam
- Liauw, 2015, *Administrasi Pembangunan (Studi Kajian PKL)*. Bandung: Refika Aditama.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rafika Aditama
- Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif(edisi Revisi)* Bandung: PT.Remaja Rosda Karya
- Nasution, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif(edisi Revisi)* Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Richard. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, 2016. *Fungsi - Fungsi Manajerial*. Bandung: Alfabeta.
- Steers Richard, M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangg
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, 2004, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Syafi'ie, 2007, *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Pertja
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Pengantar Saefullah, Djadja. AIPi Bandung – PUSLITKP2WLEMLIT UNPAD.
- Tangkilisan, 2011, *Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa
- Wahab, 2014, *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta : Reanika Cipta
- Webster, 2009, *Filsafat Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, STIA LAN RI;
- Winarno Budi, 2012, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Zuriah, 2006, *Statistik untuk Ekonomi dan Niaga*, Cetakan Keempat, PT. Gelora Aksara Pratama; Jakarta

Dokumen Lain :

UU No. 6/2014 Tentang Desa

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu